

MAKNA SEKOLAH BAGI ANAK USIA SEKOLAH DI KOTA SURAKARTA

Zaini Rohmad*, Siti Chotidjah, dan Atik Catur Budiati

Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

***Alamat korespondensi:** Perum Dosen UNS, Jl. Berdikari I No. 12 Jati-Jaten, Karanganyar

ABSTRACT

This study aims to know the children's insight toward the existence of school as educational institution and to improve their critical awareness toward the real meaning of education. This study uses descriptive qualitative method for identifying the meaning of school, the impact of that meaning and the implications for the development of the educational system in Indonesia. The results show that school, for children, is defined as the process of knowledge transferring, hence it will be useful to seek jobs. This concept is also supported with schooling-oriented thinking. It means that children have to go to their school in order to meet their duty toward their parents and country. In boarder sense, school (or schooling) works as the representation of socio-cultural phenomenon because it contains such policies and programs issued politically in which the act of those is forced and dominated by the leaders. The effect of these situations is that the children lack awareness of the truly meaning of schooling. It implies that the school children are less good in daily life behaving and less in paying attention and caring of their surrounding environment. Based on those arguments, we need to train the children to act critically and improve their critical awareness so that the school children have good morality and attitude that make them useful for the existence of our nation.

Kata kunci: sekolah, anak usia sekolah, pendidikan, sosial budaya, makna

PENDAHULUAN

Sudah beberapa kali kita mengadakan pergantian undang-undang pendidikan. Sampai keluar sebuah *statement* ganti menteri ganti kebijakan. Meskipun pergantian undang-undang dalam suatu negara bukanlah hal yang aneh dan tidak perlu menjadi soal, karena kadang-kadang pergantian tersebut dirasa sebagai sesuatu yang diperlukan bagi perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Masalahnya adalah kapan menggantinya dan untuk tujuan apa serta kapan keperluan itu mendesak untuk dilakukan. Perubahan-perubahan situasi sosial dan politik, perkembangan masyarakat dan dunia

dan perkembangan paham filsafat tentu saja dapat menjadi alasan yang signifikan untuk mengganti undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya dibedakan antara pergantian yang bersifat desakan sosial politik dan pergantian karena alasan perubahan filosofi pendidikan.

Untuk menjamin pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan, kiranya perlu sistem pendidikan yang mapan, yang rancangannya dipercayakan pada pakar pendidikan yang bebas dari motivasi politis. Akibatnya, kritik sering dikemukakan terhadap pendidikan yang disubordinasikan pada kepentingan politik pemerintah

atau negara. Tujuan akhir dari sebuah sistem pendidikan adalah pembebasan dan emansipasi masyarakat dari kebodohan, kemiskinan dan penderitaan. Melalui pendidikan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kritis, rasional, bermoral, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan peka terhadap lingkungan sosial sekitarnya.

Tetapi persoalannya, pendidikan di Indonesia belum mampu sepenuhnya menghasilkan sumber daya manusia yang bebas, kritis dan emansipatoris. Pendidikan di Indonesia menyisakan banyak persoalan yang menghantui setiap masa depan anak-anak Indonesia. Pertama, seringkali berganti kurikulum yang berimbas pada pergantian buku sekolah. Tentu saja ini sangat memberatkan bagi masyarakat di tengah krisis yang berkepanjangan. Kedua, berkembangnya model-model pembelajaran seperti *home schooling* memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak percaya lagi kepada pola pembelajaran sekolah pemerintah baik negeri maupun swasta. Ketiga, sekolah sebagai lahan bisnis. Maraknya sekolah yang memberlakukan sistem pengelolaan sekolah ala perusahaan, meskipun para pelakunya mengaku bermotifkan pendidikan sebagai salah satu pelayanan sosial. Mungkin benar yang pernah diusulkan oleh Ivan Illich dalam bukunya *Deschooling Society* bahwa untuk menyelamatkan pendidikan maka perlu pembubaran sekolah.

Pendidikan adalah sebuah proses penyempurnaan semua individu sebagai peserta didik, baik potensi intelektual atau kognitif, mental, rasa, karsa maupun kesadaran martabat kemanusiaannya. Artinya, pendidikan selalu bertujuan untuk membina kepribadian manusia menjadi lebih “manusiawi” dan mengembangkan serta mengutuhkan potensi kemanusiaannya yang masih terpendam dengan mengedepankan suasana yang penuh cinta-kasih, kedamaian dan keadilan serta mengesampingkan perilaku yang menindas serta diskriminatif. (Freire dalam Murtiningsih, 2004:6-7).

Salah satu pencapaian tujuan pendidikan nasional ini dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diakui

keberadaannya secara formal untuk menjamin keberlangsungan masa depan bangsa. Meskipun begitu, di dalam sekolah terdapat bermacam-macam siswa dengan latar belakang hidup dan karakter pribadi, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka berpakaian, mengemukakan pendapat, daya serap baik pelajaran, aturan dan peringatan, tingkat kecerdasan, kesungguhan belajar dan lainnya. Artinya, setiap siswa itu begitu beragam karakteristiknya antara yang satu dengan yang lainnya. Pasalnya, posisi dan peran siswa kurang begitu diperhatikan keberadaannya. Dalam arti siswa cenderung dijadikan sebuah produk yang tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan arah eksistensinya, hanya sebagai objek belaka. (Prasetyo, 2004:12).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) LPPM UNS menyebutkan bahwa alasan anak putus sekolah tidak hanya karena persoalan ekonomi saja, tetapi ada sebagian karena ketidaknyamanan akan kondisi sekolah. Misalnya kurikulum yang memberatkan, terjadinya kekerasan oleh oknum penghuni sekolah (guru maupun teman sekolah), maupun malas bersekolah. Ada juga yang beranggapan bahwa sekolah hanya menghabiskan waktu karena tujuan dari bersekolah adalah mendapatkan pekerjaan maka mereka memilih tidak bersekolah dan bekerja meskipun hanya menjadi pengamen jalanan

Melihat kondisi tersebut maka pendidikan tidak hanya menekankan pada peningkatan dan pengembangan ranah IQ tapi juga EQ (termasuk juga SQ). Sebagian pihak melihat pendidikan hanya sebagai proses sosialisasi dalam arti menginisiasi manusia-manusia muda sehingga dapat menyesuaikan diri kepada lingkungan. Tetapi ini harus dipahami dengan hati-hati karena bisa menjadi pelestari *status quo* yang stagnan, sedangkan fungsi menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang teratur terabaikan.

Tujuan pendidikan adalah mengasah kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual siswa agar tumbuh dan berkembang

secara seimbang. Untuk itu pendidikan harus di arahkan kepada proses emansipasi para mitra-didik, agar anak memiliki bekal untuk mengatasi dan memecahkan persoalan hidup yang dihadapi masyarakat. Melalui berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan tidak menghilangkan makna pendidikan yang sebenarnya bagi rakyat.

Masyarakat yang berubah sangat cepat memberikan rasa keragu-raguan tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Keadaan ragu-ragu bukan merupakan sesuatu yang berbahaya, tetapi berada dalam kemungkinan untuk maju. Kemungkinan untuk maju hanya dapat terjadi apabila kita mengambil keputusan yang tepat atas situasi yang dihadapi. Seperti kata Ulrich Beck bahwa kita berada pada dunia yang terbuka dan penuh resiko (*risk society*) (Tilaar, 2004:xxii).

Indonesia sedang mengalami perubahan sosial budaya secara terus-menerus, yang didorong oleh inovasi-inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan terbukanya informasi dari berbagai sumber, sehingga terjadi akulturasi antara pola-pola lama dengan pola-pola baru dalam masyarakat yang menghasilkan suatu bentuk pola masyarakat yang berbeda sebelumnya. Termasuk juga anak yang merupakan bagian dari masyarakat yang sangat mudah menerima perubahan baik positif maupun negatif.

Pendidikan sebagai institusi negara merupakan suatu lembaga sosial dasar yang mengatur kehidupan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan, masyarakat memahami esensi dari pendidikan dan berbagai dampak yang ditimbulkan. Namun, respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Dalam hal ini termasuk anak yang menjadi objek pendidikan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang di dalamnya terdapat nilai dan norma sosial yang secara tidak langsung direproduksi terus-menerus oleh para pelaku pendidikan.

Dalam tradisi Plato, pendidikan oleh negara dirancang oleh politisi. Tetapi pada saat itu, politisi adalah seorang negara-

wan yang mempunyai pengetahuan filsafat dan terbebas dari motivasi dunia (kekuasaan). Tetapi coba lihat di Indonesia, politisi hanya menjadi sekedar pelaku politik dalam kancah perebutan kekuasaan dalam suatu negara. Akibatnya, kebijakan pendidikan pun hanya dipelintir oleh para penguasa untuk kepentingan politisnya semata. Secara tak sadar, masyarakat (dalam hal ini anak) terpengaruh oleh berbagai kebijakan tersebut sehingga esensi pendidikan tidak pernah tercapai.

Sudah beberapa kali kita mengadakan pergantian undang-undang pendidikan. Sampai keluar sebuah *statement* ganti menteri ganti kebijakan. Meskipun pergantian undang-undang dalam suatu negara bukanlah hal yang aneh dan tidak perlu menjadi soal, karena kadang-kadang dirasa sesuatu perlu. Masalahnya adalah kapan menggantinya dan untuk tujuan apa dan kapan keperluan itu mendesak. Perubahan-perubahan situasi sosial dan politik, perkembangan masyarakat dan dunia dan perkembangan paham filsafat tentu saja dapat menjadi alasan yang signifikan untuk menggantikan undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya dibedakan antara pergantian yang bersifat desakan sosial politik dan pergantian karena alasan perubahan filosofi pendidikan.

Menurut Kartono (2002:4-9), konsep pendidikan dijelaskan dalam empat konsep yang terimplementasi dalam tujuan pendidikan nasional. Pertama, pendidikan adalah proses yang menempatkan siswa sebagai pribadi yang utuh. Tiga unsur utama yang harus dikembangkan adalah *competence*, *conscience*, dan *compassion* yang memberikan perhatian berimbang pada otak, hati dan tangan. Artinya, hal tersebut sangat penting untuk memberikan ruang-ruang bermain bagi siswa sebagai wujud perhatian terhadap perkembangan kepribadian yang utuh. Pengetahuan atau kompetensi memang mengambil porsi yang paling besar dalam proses pendidikan, meski demikian tidak boleh diabaikan pemberian kesempatan untuk mengasah hati nuraninya.

Kedua, pendidikan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar demi

hidup. Nilai rapor yang tinggi bukan satu-satunya tujuan siswa ketika sekolah. Ruang-ruang kelas adalah sebuah dunia yang tidak berbeda dengan dunia sesungguhnya. Belajar bahasa Indonesia tidak hanya sebatas kosakata dan tata bahasa melainkan belajar tentang masyarakat pemakai bahasa lengkap dengan budaya dan komunikasinya bisa jauh lebih menarik dan inilah yang disebut dengan belajar untuk hidup.

Ketiga, pendidikan dalam prosesnya perlu memberikan kesempatan berefleksi kepada siswa atas setiap pengalaman. Proses pendidikan lebih banyak menimbun informasi dan pengetahuan tanpa ada pengendapan. Kiranya secara khusus guru (pendidik) perlu membawa siswa untuk mensintesis antarpengalaman atau menemukan manfaat bagi dirinya. Hal ini termasuk berbagai kewajiban yang dibebankan oleh siswa seperti penggunaan seragam atau melaksanakan upacara bendera sehingga esensi dari kewajiban itu dapat dipahami.

Keempat, pendidikan adalah tanggung jawab keluarga dan sekolah. Keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama. Untuk itu, perkembangan siswa di sekolah membutuhkan dukungan nyata orang tua. Dukungan bukan sebatas pendanaan, tetapi lebih berupa pendampingan atau pembimbingan dengan memberikan perasaan aman dan tenang bagi anak-anaknya merupakan modal simbolik bagi anak untuk betah bersekolah. Selama ini, sekolah seolah-olah hanya berisi dengan bentuk penindasan secara halus karena kebiasaan orang tua yang hanya memberikan instruksi untuk belajar, belajar dan belajar untuk menjadi rangking satu tanpa peduli dengan kejiwaan anak.

Berbagai peraturan sekolah yang dikeluarkan banyak yang tidak mempertimbangkan keberadaan anak sebagai objek pendidikan. Melalui berbagai penyeragaman seperti kurikulum, seragam, upacara bendera, tambahan pelajaran mengakibatkan anak tidak memiliki pilihan untuk mengembangkan diri. Anak dicekoki dengan berbagai aturan dalam pendidikan yang kadangkala tidak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Sekolah hanya menjadi tempat untuk menghabiskan hari, datang

pagi pulang siang/sore tanpa memahami tujuan sebenarnya mereka bersekolah. Secara tidak langsung mereka telah terindoktrinasi secara kumulatif melalui pesan intelektual dan pesan budaya yang mempengaruhi cara pikir anak. Karena budaya juga merupakan sumber dominasi, di mana para intelektual memegang peranan kunci sebagai spesialis produksi budaya dan pencipta kuasa simbolik.

Menurut Bourdieu, cara indoktrinasi dapat diklasifikasikan pada satu kontinum dari implisit ke eksplisit. Indoktrinasi implisit adalah indoktrinasi prinsip bawah sadar yang memanifestasikan dirinya sendiri hanya dalam lingkup praksis, sedangkan indoktrinasi eksplisit disorganisasi secara metodis dan mendoktrinasi prinsip formal dan yang terartikulasi (Jenkins, 2004:162). Berbagai kebijakan dan aturan pendidikan dikeluarkan untuk memberikan legitimasi terhadap pola-pola pendidikan yang diselenggarakan. Bagi Bourdieu, legitimasi tersebut meneguhkan relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil. Selama dapat diterima sebagai sesuatu yang sah, kebudayaan memperkuat dirinya melalui relasi kekuasaan tersebut, memberikan kontribusi kepada reproduksi sistematis mereka. Hal ini berguna untuk mempertahankan tatanan sosial yang telah mapan.

Seluruh tindakan manusia terjadi dalam ranah sosial yang merupakan arena perjuangan sumber daya, individu, institusi untuk membedakan dengan manusia lain dan mendapatkan modal yang berguna dan berharga. Salah satunya melalui pendidikan, Bourdieu menyebutnya sebagai habitus. Habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Artinya, habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran terjadi secara halus, tak disadari, dan tampil “wajar” sehingga seolah-olah alamiah terberi oleh alam atau sudah dari sananya. Habitus mendasari ranah yang merupakan jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan

sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individu (Rahmana, 2000:xii).

Peran yang dimainkan oleh sistem sekolah dapat ditinjau melalui pengkajian terhadap adanya lima praktik berbagai ketidakmerataan terlanggengkan. Pertama, bagi anak-anak yang kurang mampu, harapan-harapan disesuaikan berdasarkan kesuksesan ini dan menjadi bagian dari habitus. Kedua, ketika kesuksesan dicapai, anak-anak yang kurang mampu (dan keluarganya) cenderung membuat opsi yang “keliru”. Ketiga, kebodohan terpelajar dari sekolah-sekolah dan para agen seleksi hanya mengakui orang-orang yang mengakui mereka. Keempat, pencemaran akademis. Kelima, devaluasi ijazah yang menjadi modal simbolik bertindak sebagai pengganda produktivitas modal pendidikan.

Anak bersekolah merupakan aktivitas rutin yang harus dijalani meskipun anak menyukai atau tidak menyukai. Kadangkala anak juga dipaksa untuk bersekolah yang bukan menjadi pilihannya, tetapi ditentukan oleh orang tua bahkan pada tingkatan minat dan bakatnya (jurusan). Ini merupakan tindakan di luar kesadaran individu, karena bagi orang tua ini penting bagi keberlangsungan tatanan sosial. Orang tua yang berprofesi sebagai dokter memaksa anak untuk mengambil jurusan IPA sehingga dapat melanjutkan studi di bidang kedokteran. Hal ini untuk tetap mempertahankan status sosial ekonomi mereka di mata masyarakat. Strategi individu dalam mengkonstruksi dunia sosial mereka, bertindak untuk mereproduksi posisi-posisi mereka, dan memperoleh posisi dalam dunia sosial. Faktor yang membuat seorang anak nyaman berada di lingkungan insitusi pendidikan tertentu merupakan produk pendidikan keluarga yang menciptakan atau mereproduksi ketimpangan kelas dalam konteks prestasi belajar anak.

Selanjutnya, Bourdieu menyebutkan bahwa dalam sebuah masyarakat plural masa lalu dan masa kini kebudayaan tertentu harus dipelihara dan direproduksi di sekolah-sekolah. Kebudayaan kelompok dominan yang mengontrol sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik “diwujudkan” di

sekolah-sekolah dan 'pewujudan' inilah yang bekerja sebagai strategi reproduksi bagi kelompok dominan. Strategi reproduksi dijalankan melalui praktik di sekolah (Rahmana, 2000:110). Sekolah merupakan sumber belajar anak yang di dalamnya berisi berbagai macam pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum intelektual pemegang kunci keberlangsungan sistem pendidikan.

Dalam kelas, anak-anak belajar tepat waktu, menulis bagus, memakai kertas dengan cermat, dan tenang waktu guru berbicara, mengangkat tangan waktu akan mengajukan saran dan menjawab pertanyaan dan menguatkan dorongan untuk bersaing dan menjadi lebih dari yang lain. Dalam perkumpulan di sekolah, siswa belajar menjadi pemimpin misalnya mengikuti OSIS, pramuka maupun kegiatan keagamaan. Walaupun demikian, terlihat dengan nilai-nilai begini tidak menjamin bahwa siswa mampu menyerap nilai-nilai itu sebagai nilainya sendiri.

Pendidikan yang tidak mencerahkan dan tidak membebaskan sama artinya membunuh masa depan bangsa. Sampai batas-batas tertentu, pendidikan yang kita kembangkan selama sekian dekade adalah pendidikan yang membunuh kuncup-kuncup terbaik dari anak bangsa. Dengan dalih untuk menjaga keamanan dan stabilitas demi pertumbuhan ekonomi, bangsa kita telah digiring untuk mendukung sebuah sistem kapitalis semu yang melahirkan konglomerasi korup dan serakah.

Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Pertama, kesadaran magis adalah suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam dunia pendidikan, jika proses belajar-mengajar tidak mampu melakukan analisis terhadap satu masalah maka proses belajar-mengajar tersebut disebut pendidikan fatalistik. Proses pendidikan ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan di dalam masyarakat. Siswa secara dogmatik menerima kebenaran dari guru, tanpa ada mekanisme untuk mema-

hami makna ideologi dari setiap konsepsi ata kehidupan masyarakat

Kedua, kesadaran naif, yaitu keadaan yang lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreativitas, *need for achievement* dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Pendidikan dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan sistem dan struktur bahkan sistem dan struktur yang ada sudah baik dan benar yang merupakan faktor *given* sehingga tidak perlu dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut.

Ketiga, kesadaran kritis, yaitu lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan melatih siswa untuk mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya.

Oleh karena itu, anak tidak hanya dijadikan objek semata tetapi harus mampu memaknai pendidikan sebagai pembebasan dan emansipasi dari kebodohan dan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengambil perumusan masalah bagaimana makna sekolah di mata anak-anak usia sekolah baik yang bersekolah maupun tidak bersekolah? Kemudian, bagaimana dampak pemaknaan tersebut bagi perkembangan perilaku pendidikan anak? Berikutnya apa implikasinya bagi masa depan pendidikan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat mengarahkan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban *ontologis*, yaitu tentang makna sekolah bagi anak. Selain aspek *ontologis*

penelitian ini juga mengarahkan kepada aspek *epistemologis*, yaitu untuk mendapatkan jawaban tentang batasan metodologis bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Batasan metodologis ini penting bagi perumusan kebijakan, karena anak bukan hanya objek pendidikan saja tetapi aktor pendidikan utama yang seharusnya diakui eksistensinya. Penelitian ini juga mengarahkan kepada aspek *axiologis* untuk mendapatkan jawaban tentang implikasi pemaknaan sekolah terhadap masa dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya dan masa depan anak pada khususnya.

Lokasi penelitian ini di kota Surakarta (Solo) dengan pertimbangan di kota Solo saat ini sedang mengembangkan program sebagai kota layak anak yang salah satu indikatornya adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, sangat tepat mengambil penelitian tentang makna sekolah bagi anak karena hal ini akan berimplikasi bagi perkembangan pendidikan khususnya di kota Solo.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara, *focus group discussion* (FGD) dan dokumentasi. Selanjutnya, data-data dari hasil wawancara, FGD, dokumentasi dan pengamatan (observasi) akan dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau *fieldnotes* (Fetterman dalam Wiyata, 2002:28). Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat sesegera mungkin diungkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Simbolik Sekolah

Asumsi sekolah sebagai hal yang dibutuhkan dalam pendidikan anak-anak begitu besar sehingga meskipun banyak perdebatan mengenai bentuk sekolah dan bahan-bahan yang harus diajarkan hampir tidak ada diskusi apakah sekolah merupakan lembaga yang tidak tergantikan seperti yang dilihat masyarakat. Hal ini sejalan dengan perluasan pendirian sekolah-sekolah umum dan undang-undang wajib belajar untuk menunjang tujuan pendidikan. Di se-

kolah yang *notabene* adalah tempat untuk menimba ilmu seringkali di sanalah sumber ketidakadilan itu muncul. Seperti yang dikemukakan oleh Bourdie (Jenkins, 2004: 162) bahwa sekolah tidak lebih sebagai model indoktrinasi yang dilegitimasi untuk meneguhkan relasi kekuasaan. Artinya, sekolah itu melanggengkan kekuasaan melalui dominasi dan hegemoninya tentang diskriminasi kelas, ras, gender, maupun kekeerasan simbolik.

Sekolah lebih merupakan ide baru dalam sejarah manusia yang tampaknya tidak berhasil dalam pendidikan akademis dan sekolah sangat payah dalam aspek sosial. Produksi massa belum menghasilkan orang-orang yang baik, pandangan umum bahwa orang-orang yang baik dan sukses bisa begitu meskipun pengalaman sekolah mereka tidak sejalan. Banyak tokoh-tokoh yang sukses dalam masyarakat tidak mengenyam pendidikan yang tinggi.

Kurikulum pembelajaran pada sekolah dirancang untuk mengakomodir tantangan dan keterbatasan dari sebuah sistem yang menempatkan sejumlah besar anak di usia yang sama dalam satu ruangan selama lima atau enam jam sehari, enam hari dalam seminggu. Tidak ada yang ajaib yang menyebabkan pentingnya mempelajari pelajaran-pelajaran itu dalam waktu tersebut. Juga tidak ada sesuatu yang suci mengenai pelajaran-pelajaran yang terpilih itu sendiri. Jika kita mundur dan melihat dengan jelas mengenai apa yang diperlukan seorang anak ketika belajar saat mereka beranjak remaja, kita bisa melihat bahwa mereka harus bisa membaca dan menikmati membaca, berbicara dengan baik, menulis dengan koheren, mengerti konsep dasar matematika, tahu cara mencari informasi, memiliki keterampilan, memiliki keyakinan diri dan rasa percaya tinggi akan kemampuan mereka sendiri.

Berdasarkan hasil FGD, dapat disimpulkan sekolah bagi anak-anak dimaknai sebagai sarana belajar pembelajaran secara formal, sarana untuk mendapatkan ijazah, kewajiban bagi siswa untuk mematuhi semua peraturan sekolah dan sarana

mencari ilmu dan pengetahuan. Dari pemaknaan sekolah tersebut memberikan sebuah asumsi bahwa sekolah hanya dilihat dari segi kognitif saja, yaitu pencarian ilmu pengetahuan yang dibuat secara formal yang di dalamnya siswa terikat dengan segala macam peraturan untuk selanjutnya mendapatkan ijazah.

Kondisi ini didukung dengan alasan mereka bersekolah bukan karena keinginan pribadi untuk menjadi pribadi unggul, mandiri, dan humanis, tetapi adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain yang memiliki otoritas mengatur masa depan anak. Adapun pihak yang berkuasa itu, yaitu: (1) Negara. Sekolah merupakan kewajiban anak yang tertuang di dalam peraturan pemerintah tentang wajib belajar khususnya lulus pendidikan dasar; (2) Orang Tua. Sekolah bukanlah menjadi keinginan pribadi anak untuk menjadi cerdas, tetapi mereka bersekolah karena adanya dorongan yang kuat dari orang tua. Harapannya dengan bersekolah, jaminan masa depan anak terwujud. Dominasi orang tua ini juga menyangkut soal pembiayaan sekolah. Bagi mereka, biaya sekolah menjadi urusan dan tanggungjawab orang tua sehingga mereka tidak begitu mempersoalkannya; (3) Ilmu Pengetahuan. Sudah sejak awal berdirinya, tujuan sekolah adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan ijazah sebagai bukti yang sah seorang anak mendapatkan pendidikannya di sekolah formal. Imajinasi anak ketika mereka bersekolah adalah mendapatkan ilmu pengetahuan untuk selanjutnya mudah mendapatkan pekerjaan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kota Solo mencanangkan jam wajib belajar. Program ini disosialisasikan sampai ke tingkat rumah tangga sehingga setiap anak yang tinggal di wilayah Solo wajib menaatinya. Jam belajar dimulai pukul 19.00 – 21.00. Pada saat itu, anak tidak boleh menonton televisi, nongkrong/keluar rumah, maupun aktivitas lainnya di luar belajar. Tetapi kenyataannya, pemberlakuan jam wajib belajar ini tidak efektif karena tidak diikuti dengan kesadaran kritis

dari para pelaku pendidikan khususnya anak sekolah.

Program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Solo tidak selamanya didukung oleh kesadaran semua pihak dalam hal ini keterlibatan orang tua dan masyarakat. Program jam belajar ini sebenarnya sangat penting untuk mendukung lingkungan yang nyaman bagi anak untuk belajar sehingga anak lebih memiliki rasa dan perhatian serius terhadap proses pembelajaran mereka.

Dari hasil pemaknaan sekolah serta bagaimana anak melihat program sebagai faktor pendukung suksesnya penyelenggaraan sekolah memperlihatkan bahwa sekolah hanya dimaknai sebagai lembaga transfer ilmu pengetahuan saja sehingga ketika anak mendapatkan nilai yang buruk dalam sekolah dianggap sebagai anak bodoh. Padahal filosofi pendidikan melalui sekolah bukan hanya melihat dari sisi kognitif saja melainkan bagaimana membangun kepekaan dan kepedulian sosial anak di dalam melihat realitas masyarakat yang ada. Hal ini tidak lagi sesuai dengan filosofi pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire (Murtiningsih, 2004), bahwa sekolah seharusnya melahirkan individu-individu yang mampu mendekonstruksi dan merekonstruksi sistem yang ada.

Representasi Sosial Budaya dalam Sekolah

Adanya pandangan yang kuat di kalangan para pendidik radikal bahwa pendidikan ataupun penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik ataupun terbebas demi melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan bagi aparatus dominasi selalu digunakan demi melanggengkan ataupun melegitimasi dominasi mereka.

Berdasarkan pada hasil observasi memperlihatkan bahan relasi guru dengan siswa di sekolah bukan subjek dengan subjek. Pola hubungan antara guru dan siswa lebih mencerminkan sebagai tuan dan ham-

ba, antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Begitu lihai seorang guru memanajemen ketakutan di kalangan siswa. Siswa takut mendapat nilai jelek, takut tidak naik kelas, takut tidak lulus, seolah guru menjadi penentu hidup dan mati.

Ketika seseorang menyandang predikat guru, yang tertanam di benak adalah tugas untuk mentransfer ilmu. Tidak peduli sampai atau tidak, yang penting apa yang telah disampaikan selesai dan tuntas memenuhi kurikulum, dan pada saatnya nanti jika ada tes ataupun ulangan anak didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk menjaga disiplin kelas, guru sering bertindak otoriter, menjauhi anak didik, bersikap dingin.

Proses mendidik dipahami sebagai proses mencetak orang, seakan para lulusan sekolah dituntut memiliki wajah, gaya penampilan, atau seragam tertentu. Siswa dimasukkan ke dalam kotak tertentu, lalu keluar dengan bentuk yang sama dengan cetakannya. Kebiasaan sekolah hanya dengan mencatat terus-menerus membuat siswa merasa kegiatan di sekolah menjadi membosankan. Selain itu, adanya perbedaan pendapat dengan guru ditambah guru tersebut sangat otoriter terhadap siswanya membuat sekolah menjadi milik guru saja.

Selain itu, penyelenggaraan penerimaan siswa baru melalui sistem orientasi siswa dinilai hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam kakak kelasnya sehingga pelaksanaan kegiatan ini dirasakan tidak ada manfaatnya. Dalam bahasa Bourdieu, hal ini telah terjadi dominasi kelas yang dilakukannya oleh senior terhadap junior yang baru memasuki sekolah tersebut. Ancaman diskriminasi kelas ini jelas menjadi momok bagi anak ketika mendapatkan sekolah baru. Penindasan dan penekanan siswa baru melalui orientasi siswa memberikan representasi sosial budaya bahwa ajang balas dendam dilegalkan dalam sistem sekolah.

Artinya, sekolah hanya dilihat sebagai representasi sosial budaya karena di dalamnya juga ada program-program kebijakan pemerintah yang dipaksakan hanya untuk menanamkan nilai-nilai kekuasaan untuk mempertahankan *status quo*. Hal ini

menurut keyakinan Bourdie (Rahmana, 2000), sekolah sebagai habitus hanyalah jaringan relasi antarposisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individu. Keberadaan upacara bendera, peraturan baris-berbaris (PBB) memperlihatkan ideologi militeristik karena di dalamnya penuh dengan aturan-aturan yang mendisiplinkan tubuh siswa.

Hal ini jelas memperlihatkan sekolah sebagai representasi sosial budaya yang sedang berkembang di Indonesia berkaitan dengan kondisi politik bangsa. Perkembangan sosial politik yang terjadi di dalam sistem negara menentukan kondisi sosial budaya dalam sistem pendidikan (baca: sekolah). Sekolah seharusnya menjadi lembaga otonom berubah ketika di dalamnya ada kepentingan politis yang berbicara.

Selain politik, representasi sosial budaya juga dilihat dari pandangan masyarakat terhadap keberadaan sekolah. Kondisi ini menambah sederet makna bias dalam menjalani hari-hari di sekolah. Melalui lembaga sekolah seseorang dianggap mengawali kesuksesan dalam hidupnya. Artinya, kewajiban anak adalah sekolah tanpa melihat kebutuhan dan kepentingan anak itu apakah dapat terwakili melalui proses pembelajaran di sekolah atau tidak. Masyarakat mengagung-agungkan lembaga pendidikan sekolah sebagai lembaga yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak. Padahal berbagai kalangan aktivis pendidikan mulai mengulirkan pemikiran pendidikan tanpa sekolah, seperti yang dilakukan oleh Kak Seto dengan sistem "*home schooling*".

Penciptaan Kesadaran Semu Anak Sekolah

Berbagai carut-marut kehidupan berbangsa di berbagai daerah seolah-olah tidak ada penghargaan kepada manusia secara fisik dan segenap harkat kemanusiaannya. Betapa mudah nyawa melayang tanpa sedikit pun menyisakan penyesalan bahwa itu manusia. Penghargaan antarmanusia di negeri ini kiranya baik kalau mulai dikoreksi dari praksis pendidikan yang tampaknya semakin mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan orang muda-muda. Kalau mereka

dididik sebagai robot maka mereka pun akan tumbuh dengan mengabaikan penghargaan kepada sesama di sekitarnya sebagai manusia.

Fenomena yang muncul sekarang adalah semakin tinggi seseorang bersekolah, semakin terasing pula mereka dari lingkungan sekitar dan oleh sebab itu semakin besar hasrat mereka untuk meninggalkan desa menuju ke kota, menjadi kaum urban. Para siswa itu merasa terasing karena tidak bisa melakukan apa-apa seperti yang dijalani masyarakatnya, sehingga ada pepatah mereka anak petani tetapi tidak bisa bertani lagi, anak nelayan tetapi tidak kenal laut, dan sebagainya. Makna anak terhadap keberadaan sekolah ini juga dilihat oleh guru sebagai orientasi mencari pekerjaan.

Banyak ditemui bahwa anak usia sekolah enggan untuk pergi ke sekolah karena anak justru merasa teralienasi ketika bersekolah. Itulah yang membuat anak sering merasa malas untuk bersekolah. Sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi tempat yang paling menghantui bagi anak. Fenomena inilah yang tampak sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya. Guru kerap ditakuti serta menjadi momok yang berakibat anak menjadi malas untuk pergi ke sekolah karena tidak mengerjakan PR dengan benar sehingga akan menerima hukuman.

Masyarakat masih memiliki penilaian bahwa murid yang baik adalah murid yang meraih nilai yang baik, dan kalau bisa yang terbaik. Asumsi ini belum berubah dan menjadi patokan bagi banyak pihak. Kriteria anak didik yang baik diukur dari nilai akademis. Hal ini tercermin dalam pemberlakuan standar kelulusan nasional yang hanya melihat dari segi kuantitas saja.

Keberhasilan orang-orang yang tak sempat masuk (gedung) sekolah sesungguhnya menjadi semacam peringatan dan gugatan terhadap ketersesatan makna sekolah yang selama ini menjajah wilayah pemikiran dan sikap kita. Penghargaan yang berlebihan terhadap gelar kesarjanaan (akademis) dapat meracuni pikiran masyarakat banyak. Banyak fakta sejarah yang menun-

jukkan bahwa sekolah (termasuk universitas) justru dapat membuat kita terasing dari persoalan kehidupan nyata, enggan bekerja keras dari bawah (karena dipasung ijazah tanpa makna), dan menjadi tidak kreatif menghadapi masa-masa sulit, sehingga gagal dalam karier dan kehidupan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, akhirnya implikasi sistem pendidikan yang ada di Indonesia memberikan sebuah pengetahuan baru tentang proses pendidikan. Adapun dalam memahami pemaknaan yang diberikan anak-anak usia sekolah terhadap keberadaan sekolah dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, proses pendidikan yang melibatkan berbagai macam kapasitas dan kemampuan manusiawi anak didik terutama bertujuan mengembangkan kepribadiannya menjadi pribadi yang bertumbuh secara sempurna. Karenanya pendidikan mestinya memusatkan perhatian pada proses formasi pribadi anak agar semakin mampu menumbuhkan kesadaran, solidaritas, kebebasan dan tanggungjawab dalam kerangka sebagai bagian dari sebuah realitas sosial.

Kedua, tanggung jawab pendidikan tidak bisa dipahami melalui sudut pandang sektoral. Hal ini mengingat corak relasional proses pendidikan melibatkan jalinan-jalinan yang kompleks. Karena itu, setiap instansi pendidikan semestinya memahami fungsi dan peranannya. Orang tua tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya agen tunggal dalam pendidikan anak atau sekedar penanggungjawab ekonomis. Keluarga masih memiliki peran penting dalam proses sosialisasi nilai bagi diri anak sebab keluarga anak-anak mengenali dimensi valorial bagi hidup mereka.

Ketiga, menganggap bahwa dengan sekolah semua persoalan sosial bisa diselesaikan merupakan pandangan yang keliru. Benar bahwa tanpa pendidikan yang baik masyarakat tidak akan stabil, sebab ada defisit dalam hal akuisisi nilai-nilai non material sebuah kebudayaan. Namun, sangat keliru menganggap lembaga pendidikan merupakan tempat reparasi siswa agar menjadi pribadi yang baik. Sekolah bukanlah tempat untuk bisa mengobati segala macam penyakit. Lingkungan di luar dunia pendidikan justru memiliki pengaruh esensial dan memiliki dimensi formatif lebih kuat bagi proses penyempurnaan diri seorang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, Eko. (2004). *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Insist Press.
- Jenkins, Richard. (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kartono. (2002). *Menebus Pendidikan yang Tergadai*. Yogyakarta: Galang Press .
- Murtiningsih, Siti. (2004). *Pendidikan Alat Perlawanan Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rahmana. (2000). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*. Yogyakarta. Jalasutra.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme (Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wiyata, Latief. (2002). *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.